

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Gahlia Indonesia.
- Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta:Kencana.
- Arswendon Atmowiloto.1996. *Hak-Hak Narapidana*. Jakarta:Elsam.
- Effendy, Marwan.2014 *Teori Hukum Dari perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta:Gaung Persada Press Group.
- E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta:Kanisius.
- Frans Hendra Winarta, 2009, *Probono Publico : Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta:Pusaka Utama.
- Harahap, M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta:Sinar Grafika.
- , 2015. *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*. Jakarta:sinar grafika.
- Harry Pratama Teguh, Usep Saepullah. 2016. *Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus*. Bandung:Pustaka Setia.
- Hiariej, Eddy O.S. 2017. *Hukum Acara Pidana*. Tangerang selatan:Universitas Terbuka.
- , 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta:Rangkang Education.
- Kaligis, O.C. 2012. *M. Nazaruddin (Jangan Saya Direkayasa Politik dan Dianiaya)*. Jakarta:Yarsif Watampone.
- Kristian & Yopi Gunawan, 2013, *Sekelumit Tentang Penyesuaian Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Bandung:Penerbit Nuansa Aulia.

- Lubis, M. Sofyan. 2010. *Prinsip Miranda Rule: Hak tersangka Sebelum Pemeriksaan: Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Peradilan*. Jakarta: PT. Pusaka Buku.
- L.J Van Apeldoorn. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan kedua puluh lima. Jakarta: Pradnya Paramita.
- M.L Hc. Hulsman, 1984, *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Pangaribuan, Luhut M.P. 2013. *Hukum acara pidana surat resmi advokat dipengadilan*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- PH Hutadjulu, 1999, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP*, Bandung: Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. 1997. *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Soerjono Soekamto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerodibroto, Soenarto. 1999. *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Wiwin Yulianingsih. 2016. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tommy Hendra Purwaka. 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Widodo. 2004, *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi Dilengkap Contoh*. Jakarta: Yayasan Kelopak.
- Yahman, Nurtin Tarigan. 2019. *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenadamedia Group.

JURNAL

- Andry Rahman Arif, Januari-Maret 2015, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, ISSN 1978-5186, Vol. 9 No. 1.
- Anwar Hafidzi, 01 Juni 2015, *Eksistensi Advokat Sebagai Profesi terhormat (Officium Nobile) Dalam Sistem Negara Hukum Di Indonesia*, *Khazanah, Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 13 Nomor 01.
- Ariakta Gagah Nugraha, 3 September 2017, *Kewenangan Diskresi dan PetanggungJawaban Hukum Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12 No.3.
- Bagus Subekti, *Keabsahan Penggunaan “Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum” Pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Di Polresta Pontianak Berdasarkan Ketentuan Pasal 56 KUHAP*
- Dennis Kojongian, Juni 2015, *Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan*, *Lex Crimen*, Vol. 4 No.4.
- Diding Rahmat, 01 Januari 2017, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, *Jurnal Unifikasi*, ISSN 2354-5976, Vol. 04 Nomor 01.
- Finta Riris Sitorus, Oktober 2016, *Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III Nomor 02.
- Irwan Safaruddin Harahap. Juni 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1.
- Muhammad Schinggyt Tryan, tahun 2016, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Diponogoro Law Journal*, Vol 5 nomor 4.

SKRIPSI

Asmi Siswati Asis, 2016, *Impelementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kepolisian Resort Bulukumba*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).

Hendra Gunawan Saputra, 2020, *Upaya Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Polres Tegal*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti).

Miftha Rizky Amelia, 2018, *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Miranda Rule Pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Merauke Nomor 16/Pid.B/2011/PN.MRK*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang).

MAKALAH

Eko Riyadi, *Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia DI Indonesia*, Makalah (dibawakan dalam *advanced training* hak ekonomi, sosial dan budaya bagi dosen hukum dan HAM diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia), 11 Oktober 2012

INTERNET

www.kickandy.com/theshow/1/1/1793/read/PERADILAN-SESAT/, Diakses pada 23 mei 2020 pukul 10.31 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17209/pengadilan-sesat-revisi-kuhapmenjawab/>, diakses pada 23 Mei 2020, pukul 15.43 WIB

www.trunity.net/kontraspapua/articles/view/164977/?topic. Diakses pada 24 Mei 2020, Pukul 16.40 WIB

https://www.google.com/search?q=adnan+buyung+nasution&safe=strict&rlz=1C1HLDY_idID884ID884&sxsrf, diakses 4 Juni 2020, pukul 23.45 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cb826745c95d/perbedaan-pro-bono-dengan-bantuan-hukum-ilegal-aid-i/>, 20 April 2020 pukul 14.11 WIB

WAWANCARA

Lukman Hakim, Ahli Hukum Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Jakarta pada bulan Juni 2020

Abdul Haris Semendawai, Ahli Hukum Pidana Universitas Islam As-syafiiyah di Bekasi pada bulan Juni 2020

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Komite Kerja Advokat Indonesia. Kode Etik Advokat Indonesia. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultas Hukum Pasar Modal (HKHPM).